

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Arif, Saiful. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang: Averroes Press.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darwin, Muhajir. 1992. *Hasil Loka karya, Analisa Kebijakan Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Dewi, RK. 2016. *Studi Analisis kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasibuan, Malayu SP. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- J.S. Badudu Sultan Mohhammad Zain.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kumorotomo, Wahyudi.2005. *Mewujudkan Good Government Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Moleong, LJ. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- _____. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mukarom, Zaenal. Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muri, YA. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitataif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

- Naim, Ngainun. 2017. *Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-ruzzMedia.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode penelitian*. Bogor Selatan: Gralia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratminton dan Atik Septi Winarsih, 2009. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Juniarso. Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit NUANSA.
- Setiyono, Budi. 2016. *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sinambela, LP. 2005. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Aplikasi)*. Syafie, IK. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Thoha, Mifta. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Alfabeta.
- Yusuf, Burhanuddin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

UNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, *tentang Pemerintahan Daerah secara terpadu telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, *tentang Pelayanan Publik*

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Asas-Asas Penyelenggara Pelayanan Publik,*

PERATURAN PEMERINTAH

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang pelayanan publik.*

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, *tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota,* pada Pasal 7 Ayat (1) ditetapkan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 *tentang Kecamatan.*

Qanun Nomor 8 Tahun 2008 *Tentang pelayanan publik.*

PERMENDAGRI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, *tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 8 (2) Nomor 4 tahun 2010, *tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 10 Nomor 4 tahun 2010, *tentang sarana prasarana penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 11 Nomor 4 tahun 2010, *tentang pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238 – 270 *tentang*

